



SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN RI
BIRO INFORMASI PERTAHANAN

KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

INTISARI KEGIATAN

Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan RI menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka mendukung penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Pertahanan untuk memastikan bahwa seluruh unit pelayanan publik menjalankan tugasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, serta mendorong terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Permenhan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- Keputusan Sekjen Kemhan Nomor KEP/1924/XII/2024 tentang Program Kerja dan Anggaran Biro Infohan Tahun 2025.
- Keputusan Menhan Nomor KEP/1759/XII/2024 tentang Informasi Kinerja Bagi Pegawai Kemhan.

Rapat koordinasi dijadwalkan pada Rabu, 7 Mei 2025 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Biro Informasi Pertahanan, Gedung A.H. Nasution Lantai 9, Kemhan RI, Jakarta Pusat.

Peserta rapat adalah pejabat dari berbagai satker dan subsatker Kemhan yang menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk di antaranya Itjen, Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Puskod Baranahan, Puslaik, serta RS dr. Suyoto. Masing-masing unit menugaskan pejabat yang membidangi pengelolaan data, informasi, pengaduan, maupun perizinan sesuai lingkup tugasnya.

Melalui rapat ini diharapkan tercapai pemahaman bersama mengenai mekanisme penilaian kepatuhan Ombudsman RI, serta terbangunnya kesiapan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan sesuai prinsip good governance.

SURAT



SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN RI BIRO INFORMASI PERTAHANAN

Nomor : BJ/RI/11/2025/ROINFORMAN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 30 April 2025
Kepada

Yth. Pejabat sesuai daftar terlampir

di

Jakarta

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- c. Keputusan Sekjen Nomor: KEP/1924/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Program Kerja & Anggaran Biro Infohan Kemhan RI Tahun 2025.
- d. Kepmenhan Nomor: KEP/1759/XII/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Informasi Kinerja Bagi Pegawai Kemhan.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka pelaksanaan penilaian tahunan atas kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI, dimohon kesediaan para pejabat terlampir untuk menghadiri rapat koordinasi tentang penyampaian kegiatan penilaian tersebut yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan
(Gedung A.H. Nasution Lantai 5, Kementerian Pertahanan
Jl. Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat
pakelan : Yang berlaku pada hari itu
pimpinan : Karoinfohan Sekjen Kemhan

3. Demikian mohon menjadikan perkara.

Kepala Biro Informasi Pertahanan,



Praga Widada Inkomteang
Biro Informasi Pertahanan
Sekretariat Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan
2. Irjen Kemhan
3. Dirjen Strahan Kemhan
4. Dirjen Potran Kemhan
5. Kabaranahan Kemhan
6. Kapuslak Kemhan
7. Kapusrehab Kemhan
8. Karumkit di. Suyoto Kemhan.

- 2 Lampiran Surat Karo Infohan Seljen Kemhan
Nomor : B/RI/11/2025/RO/INFOHAN
Tanggal : 30 April 2025

DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG

I. ITJEN KEMHAN

1. Pengelola Pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPORI:
- Kasubbag Dokaipitaka Bag Dain Itjen Kemhan.
 - Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi pengelolaan pengaduan publik (1 orang).

II. DITJEN STRAHAN KEMHAN

- Pelayanan Penerbitan Perizinan *Security Clearance* bagi Warga Negara Asing (WNA) Non Diplomatik yang melaksanakan kegiatan dengan Kemhan dan TNI oleh Ditersnhan Ditjen Strahan Kemhan:
 - Kasi Perizinan Tamu Asing Ditersnhan Ditjen Strahan Kemhan.
 - Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi perizinan (1 orang).
- Pelayanan Penerbitan Perizinan *Security Clearance* dan *Security Officer* bagi Survei Pemetaan oleh Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan:
 - Kasi Kerjasama dan Perizinan Survei dan Pemetaan Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan.
 - Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi perizinan (1 orang).

III. DITJEN POTHAN KEMHAN

- Pelayanan Perizinan Penetapan Industri Pertahanan, Pelayanan Perizinan Badan Usaha Bahan Peledak dan Pelayanan Perizinan Produksi Ekspor/Impor Aljabankam oleh Dittekinhdan Ditjen Pothan Kemhan:
 - Kasi Perizinan Produksi Dittekinhdan Ditjen Pothan
 - Kasi Perizinan Ekspor dan Impor Dittekinhdan Ditjen Pothan
 - Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi perizinan (2 orang)

IV. DITJEN KUATHAN KEMHAN

- Pelayanan Surat Perizinan Rekomendasi Senjata Api, Munisi dan Buku Cadang pengeluaran barang dari kawasan pabean dan Pelayanan Surat Ijin penggunaan, peminjaman, pembelian dikeluarkan oleh Menteri oleh Ditmal Ditjen Kuathan:
 - Kasi Perizinan Senjata Ditmal Ditjen Kuathan Kemhan
 - Kasi Perizinan Amunisi dan Bahan Peledak Ditmal Ditjen Kuathan Kemhan
 - Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi perizinan tersebut (2 orang)

V. PUSKOD BARANAHAN KEMHAN


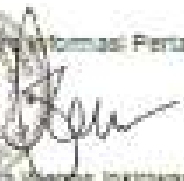
5. Pelayanan Kodifikasi Nomor Sediaan Nasional (NSN) Materiil Pertahanan dan Pelayanan Kode NDAGE (NATO Commercial and Government Entity) oleh Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan:
 - a) Kasubbid Identifikasi dan Kodifikasi Bid Opskod Puskod Baranahan Kemhan
 - b) Kasubbid Validasi Data Kodifikasi Bid Opskod Puskod Baranahan Kemhan
 - c) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi pertiznah tersebut (2 orang)

VI. PUSLAIK KEMHAN

6. Pelayanan Sertifikasi Kelakuan Produk Alabankam (Rancang Bangun dan Produk Ser), Pelayanan Sertifikasi Kelakuan Fasilitas Pertahanan, Pelayanan Bimbingan Teknis Inspektur Kelakuan Pertahanan (Tk II dan Tk III) oleh Puslajak:
 - a) Kasubbag Data dan Informasi Puslajak Kemhan
 - b) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi pertiznah (1 orang)

VII. RS. dr. SUYOTO

7. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Pangsar Soedirman/ RS dr. Suyoto:
 - a) Wakayamed RS dr. Suyoto
 - b) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi pelayanan (1 orang)


Kepala Biro Sistemasi Pertahanan,

Brigadir Mendeis Inhiwang
Brigadir Jenderal TNI



SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN RI
BIRO INFORMASI PERTAHANAN

Nomor : B/191 /IV/2025/ROINFOHAN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu bundel
Perihal : Permohonan Sebagai Narasumber

Jakarta, 30 April 2024

Kepada

Yth. Ketua Ombudsman RI

di

Jakarta

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - b. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/1695/00/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Biro Humas Sekjen Kemhan RI Tahun 2024.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan, mohon dipapanya Ketua Ombudsman RI berkenan menunjuk 1 (satu) orang yang berkompeten untuk menjadi Narasumber pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat Biro Humas Sekjen Kemhan, Gedung A.H. Nasution
Jl. S. JI Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
peserta : Pejabat Satker/ Subsatker yang memiliki pelayanan publik.
3. Adapun topik dan narasi tujuan yang menjadi pembahasan terlampir dalam TOR (Term of Reference).
4. Demikian motion menjadikan periksa.

Kapala Biro Informasi Pertahanan,

Toga Wings Inkomwang
Biro Jendral TNI

Tembusan:

- Sekjen Kemhan



SEKRETARAT JENDERAL PERTAHANAN RI
BIDANG INFORMASI PERTAHANAN

**TERM OF REFERENCE (TOR)
SOSIALISASI PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
TA. 2025**

PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk memastikan setiap unit kerja memahami, menerapkan, dan mengevaluasi standar pelayanan publik yang berlaku. Standar pelayanan publik merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menggariskan pentingnya komitmen penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan yang adil dan setara kepada seluruh warga negara.
- b. Salah satu instrumen penting dalam proses pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan adalah Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian ini dilakukan setiap tahun dengan menggunakan sejumlah indikator dan parameter yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar pelayanan publik. Melalui penilaian ini, setiap instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pertahanan, dapat mengetahui tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta memperoleh masukan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
- c. Dalam konteks tersebut, sosialisasi ini diselenggarakan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada unit-unit kerja di lingkungan Komhan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk menyamakan persepsi, menyampaikan mekanisme penilaian, indikator-indikator yang digunakan, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil guna memenuhi dan melampaui standar pelayanan yang ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan sebagai sarana strategis untuk menyampaikan informasi yang komprehensif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan mengenai mekanisme, indikator, serta strategi pelaksanaan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman bersama serta mengkoordinasikan langkah-langkah implementasi standar pelayanan secara efektif, agar pelaksanaan pelayanan publik dapat memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

- b. Tujuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan unit kerja dalam memenuhi indikator-indikator penilaian standar pelayanan publik, mempersiapkan langkah-langkah konkret menuju pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Tahun 2025, menyampaikan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai bahan refleksi dan perbaikan, mendorong keterlibatan aktif dan kolaboratif antar unit kerja di lingkungan Kemhan, serta menumbuhkan budaya pelayanan publik yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Penyelenggara

Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

4. Waktu dan Tempat

- a. Hari, tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
b. Tempat : Ruang Rapat Biro Infohan Setjen Kemhan
Gd. A.H. Nasution Lt. 9 Kementerian Pertahanan
Jl. Medan Merdeka No. 13 – 14, Jakarta Pusat

5. Pembicara,

- Narasumber dari Ombudsman RI.

6. Peserta Rapat

a. ITJEN KEMHAN

- Pengelola pengaduan publik melalui aplikasi SP4N LAPOR!
 - a) Kasubbag Doksiptaka Bag Dalin Itjen Kemhan.
 - b) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi pengelolaan pengaduan publik (1 orang).

b. DITJEN STRAHAN KEMHAN

- 1) Pelayanan Penerbitan Perizinan Security Clearance bagi Warga Negara Asing (WNA) Non Diplomatik yang melaksanakan kegiatan dengan Kemhan dan TNI oleh Ditkesinhan Ditjen Strahan Kemhan:
 - a) Kasu Perizinan Tamu Asing Ditkesinhan Ditjen Strahan Kemhan.
 - b) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi perizinan (1 orang).
- 2) Pelayanan Penerbitan Perizinan Security Clearance dan Security Officer bagi Survei Pemetaan oleh Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan:
 - a) Kasu Kerjasama dan Perizinan Survei dan Pemetaan Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan.
 - b) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi perizinan (1 orang).

c. DITJEN POTHAN KEMHAN

- Pelayanan Perizinan Penetapan Industri Pertahanan, Pelayanan Perizinan Badan Usaha Bahan Peledak dan Pelayanan Perizinan Produksi Ekspor/Impor Alapahankam oleh Ditkesinhan Ditjen Pothan Kemhan.

- a) Kasi Perizinan Produksi Ditaklindhan Ditjen Potban.
- b) Kasi Perizinan Ekspor dan Impor Ditaklindhan Ditjen Potban.
- c) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi perizinan (2 orang).

d. ITJEN KUATHAN KEMHAN

- Pelayanan Surat Perizinan Rekomendasi Senjata Api, Munisi dan Buku Cadang pengeluaran barang dari kawasan pabean dan Pelayanan Surat Izin penggunaan, peminjaman, pembelian dikeluarkan oleh Menteri oleh Ditmat Ditjen Kuathan:
 - a) Kasi Perizinan Senjata Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan.
 - b) Kasi Perizinan Amunisi dan Bahan Peledak Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan.
 - c) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi perizinan tersebut (2 orang).

e. PUSKOD BARANAHAN KEMHAN

- Pelayanan Kodifikasi Nomor Sedilan Nasional (NSN) Materi Pertahanan dan Pelayanan Kode NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) oleh Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan:
 - a) Kasubid Identifikasi dan Kodifikasi Bid Opskod Baranahan Puscod Kemhan.
 - b) Kasubid Validasi Data Kodifikasi Bid Opskod Puscod Baranahan Kemhan.
 - c) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi perizinan tersebut (2 orang).

f. PUSLAIK KEMHAN

- Pelayanan Sertifikasi Kelakuan Produk Apalhanakam (Rancang Bangun dan Produk Serf), Pelayanan Sertifikasi Kelakuan Fasilitas Pertahanan, Pelayanan Bimbingan Teknis Inspektur Kelakuan Pertahanan (Tk II dan Tk III) oleh Puslajak:
 - a) Kasubbag Data dan Informasi Puslajak Kemhan.
 - b) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi perizinan (1 orang).

g. RS. dr. SUYOTO

- Pelayanan Kesehatan pada RS. dr. Suyoto/ Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Pangsar Soedman:
 - a) Wkayamed RS dr. Suyoto
 - b) Penyusun/ Pengolah Data Informasi atau yang membidangi pelayanan (1 orang).

T.	Pimpinan	:	Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan
E.	Pencicara	:	Narasumber dari Ombudsman RI

9. Susunan acara:

- 1). 08.30 – 09.00 WIB
- 2). 09.00 – 09.30 WIB
- 3). 09.30 – 10.00 WIB
- 4). 10.00 – 10.30 WIB
- 5). 10.30 – 11.00 WIB
- 6). 11.00 – 11.30 WIB

Registrasi

Pembukaan oleh Kapo Infotan Setjen Kemhan

Paparan I oleh Kabag Infopublikasi

Paparan II oleh Ombudsman RI

Tanya Jawab dan Diskusi

Penutup

10. Penutupan

Demikian, *Term of Reference (ToR)* Rapat Sosialisasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pertahanan ini dibuat sebagai acuan untuk pelaksanaannya.

Jakarta, 30 April 2025

Kepala Biro Informasi Pertahanan,



Frage Wenas Inkiwang
Brigadir Jenderal TNI



SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN RI
BIRO INFORMASI PERTAHANAN

SURAT PERINTAH
NOMOR: SPRIN/15/IV/2025

- Pertimbangan : Bahwa dalam rangka kegiatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Keputusan Sekjen Nomor: KEP/1924/XII/2024 tgl 20 Desember 2024 tentang Program Kerja & Anggaran Biro Infohan Kemhan RI Tahun 2025.

DIPERINTAHKAN:

- Kepada : Nama :
Pangkat/Korp/Gol/NRP/NIP : sesuai daftar terlampir.
Jabatan :
- Untuk : 1. Seterusnya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, diunjuk untuk melaksanakan kegiatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
2. Melaporkan kepada Karo Infohan Sekjen Kemhan atas pelaksanaan surat perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025



Kepala Biro Informasi Pertahanan,

Brega Wenas Inkirwang
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

- Kabag Hubmilra Biro Infohan Sekjen Kemhan.

2. Lampiran Surat Perintah Karo Infohan Setjen Kemhan
Nomor : SPR/IN/15/IV/2024
Tanggal : 30 April 2024

**DAFTAR PANITIA
FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK**

No.	NAMA	FANGKAT/KORPS/ GOL/NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Frega Wenas Inkiriwang	Brigadir Jenderal TNI	Karo Infohan Setjen Kemhan	Penanggung Jawab
2.	Joko Riyanto, S.Sos, M.Si	Kolonel Arm/ 11950050251070	Kabag Infopubliktaka Biro Humas Setjen Kemhan	Ketua
3.	Nadia Maretti, S.Si, M.M	Penata Tk I III/d 197703272009122001	Kasubbag Yaninfobik Bag Infopubliktaka Biro Humas Setjen Kemhan	Wakil Ketua
4.	Dian Ayuningtyas, S.Ikom, M.A.P	Penata Tk I III/d 195602052010122002	Penyusun Naskah Subbag Yaninfopublik Bag Infopubliktaka Rohumas Setjen Kemhan	Anggota
5.	Dyah Ayu Selyorni, S. Ikom, M.Si	Penda Tk. I III/b 195003172006042001	Pengolah Data Subbagian Peliputan dan Publikasi Bagian Pemberitaan Rohumas Setjen Kemhan	Anggota

Kepala Biro Informasi Pertahanan,

Frega Wenas Inkiriwang
Brigadir Jenderal TNI



**SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN RI
BIRO INFORMASI PERTAHANAN**

**SURAT PERINTAH
NOMOR: SPRIN/16/IV/2025**

- Pertimbangan** : Bahwa dalam rangka kegiatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Keputusan Sekjen Nomor: KEP/1824/XII/2024 tgl 20 Desember 2024 tentang Program Kerja & Anggaran Biro Infohan Kemhan RI Tahun 2025.

DIPERINTAHKAN:

- Kepada** : Nama :)
Pangkat/Korp/Gol/NRP/NIP :) sesuai daftar terlampir.
Jabatan :)
- Untuk** : 1. Seterusnya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, diunjuk untuk melaksanakan kegiatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
2. Melaporkan kepada Karo Infohan Setjen Kemhan atas pelaksanaan surat perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025


Prita Wenas Inkirwang
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

- Kabag Hubmitra Biro Infohan Setjen Kemhan.

2 - Lampiran Surat Perintah Karo Infohan Setjen Kemhan
Nomor : SPRIN/ 16 /IV/2024
Tanggal : 30 April 2024

**DAFTAR PANITIA
FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK**

No.	NAMA	FANGKAT/KORPS/ GOL/NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Aaf Sugihartati		Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan Ombudsman RI	Narasumber dari Ombudsman RI
2.	Joko Riyanto, S.Sos, M.Si	Kolonel Arm/ 11950050251070	Kabag Infopublikitaka Biro Humas Setjen Kemhan	Ketua



Kepala Biro Informasi Pertahanan,

[Handwritten Signature]
Prega Wenas Inkiwiang
Brigadir Jenderal TNI

DOKUMENTASI

